

KAJIAN DAMPAK DARI OPERASIONALISASI PT BINA INSAN SUKSES MANDIRI DALAM EKSPLOITASI LAHAN TAMBANG BATU BARA DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Muhammad Rizky Akbar¹, David Efendi², Alam Mahadika³

Abstrak

Indonesia adalah salah satu negara pengekspor batu bara terbesar nomor empat dunia hingga saat ini dengan cadangan batu bara Indonesia sebesar 29.078,28 juta ton. Pulau Kalimantan dan pulau Sumatera merupakan dua provinsi yang memiliki cadangan batu bara besar sehingga tidak menutup kemungkinan banyak kasus-kasus tambang batu bara yang terjadi di provinsi tersebut. Biasanya perkara dipicu karena wilayah usaha yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat sehingga masalah yang muncul dari segi lingkungan yang di hasilkan oleh perusahaan batu bara umumnya berkaitan dari segi sosial budaya hingga konflik lahan. Selain itu masalah yang paling serius juga di karenakan adanya peran-peran dari aktor politik yang berada di tataran pusat sampai dengan daerah yang turut mensukseskan aktivitas dari pertambangan batu bara tersebut. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana dampak dari operasi PT BISM (Bina Insan Sukses Mandiri) yang bergerak di bidang tambang batu bara terhadap dampak Sosial Politik, sosial budaya, dan Lingkungan Hidup. Penulisan ini menggunakan 3 variabel dan 6 indikator untuk mengukur dampak dari operasionalisasi PT Bina Insan Sukses Mandiri dari segi sosial politik, sosial budaya dan juga lingkungan hidup fisiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kata kunci: Dampak, Eksploitasi, Tambang Batu Bara, Ekologi .

Abstract

Indonesia is one of the fourth largest coal exporting countries in the world to date with Indonesian coal reserves of 29,078.28 million tons. Kalimantan Island and Sumatra Island are two provinces that have large coal reserves, so it is possible that many coal mining cases have occurred in these provinces. Usually cases are triggered because the business area is close to community settlements so that problems that arise in terms of the environment generated by coal companies are generally related from a socio-cultural perspective to land conflicts. In addition, the most serious problem is also due to the roles of political actors at the central to regional levels who contribute to the success of the coal mining activities. This research will examine how the impact of the operations of PT BISM (Bina Insan Sukses Mandiri), which is engaged in coal mining, has on the impacts of socio-politics, socio-culture and the environment. This writing uses 3 variables and 6 indicators to measure the impact of the operationalization of PT Bina Insan Sukses Mandiri in terms of socio-political, socio-cultural and also physical environment. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques by means of observation, interviews and documentation.

Keyword: Impact, Exploitation, Cool Mine, Ecology

^{1 1,2,3} Governmental Studies, University Muhammadiyah Yogyakarta (mrizkyakbarismail@gmail.com)

PENDAHULUAN

Adapun alasan penulis untuk meneliti tentang operasionalisasi PT Bina Insan Sukses Mandiri yang telah melakukan eksploitasi lahan berkadar kandungan batu bara di Kampung Linggang Marimum Kecamatan Mook Manar Bulan Kabuapten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

PT. Bina Insan Sukses Mandiri (PT. BISM) merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas lahan 5.000 Ha, di Kampung Linggang Marimun, Kecamatan Mook Manar Bulan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini berdasarkan surat keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 545/K.357D/2010 Tahun 2010 (BISM, 2019).

Lahan konsesi sebesar 5.000Ha yang terbagi menjadi 2 blok yaitu blok Timur dan blok Barat, di dalam lahan konsesi blok Timur terdapat kampung Linggang Marimun yang di mana kampung tersebut termasuk dalam kawasan konsesi industrialisasi pertambangan batu bara, lalu di di blok Barat terdapat hutan produksi memiliki status *Hutan Produksi Masyarakat*, dalam hal ini pihak PT Bina Insan Sukses Mandiri telah melakukan pememinjaman hutan dan telah mengganti status hutan yang awalnya *Hutan Produksi Masyarakat* menjadi *Hutan Produksi Tetap*.

Dalam dokumen PT Bina Insan Sukses Mandiri Adendum Perkiraan dan Evaluasi Dampak Penting (2019), tingginya harga batu bara telah memberikan inspirasi kepada PT. Bina Insan Sukses Mandiri untuk

mengembangkan perusahaan tersebut dengan melakukan pengeboran yang lebih dalam lagi guna mendapatkan hasil batu bara yang banyak dengan peningkatan produksi 6.000.000 MT/pertahun dari yang awalnya 4.000.000 MT/pertahun, hal tersebut di sebabkan oleh pihak perusahaan PT Bina Insan Sukses Mandiri melihat cadangan batu bara yang masih sangat banyak sehingga pihak perusahaan tersebut melakukan perpanjangan *Izin Usaha Pertambangan* guna untuk memenuhi kebutuhan domestic dan eksport (Mandiri, 2019).

Informasi dari kabarkubar.com oleh jurnalis Sonny Lee Hutagalung (2017) *Tidak Diterima Kerja Di BISM, 8 Warga Marimun Mengadu ke Bupati*, bekerja selama 4 tahun terhitung mulai dari 2010 sampai tahun 2014 lalu pada tahun 2014 PT Bina Insan Sukses Mandiri mendapatkan guncangan perekonomian yang mengakibatkan PT Bina Insan Sukses Mandiri tersebut berhenti untuk melakukan produksi dan memulai produksi Kembali pada tahun 2016 akan tetapi hal tersebut menimbulkan masalah yang dikarenakan beberapa warga tidak dapat bekerja di PT Bina Insan Sukses Mandiri akan tetapi PT Bina Insan Sukses Mandiri selalu menerima tenaga kerja asing yang seharusnya PT Bina Insan Mandiri haruslah memprioritaskan tenaga kerja lokal ketimbang tenaga kerja asing (Hutagalung, 2017).

Mendeskripsikan media PenaSatu.com DPRD Kubar Minta PT. BISM Bayar Fee Ke Masyarakat Linggang Marimun (2019), yang menyatakan bahwasannya pihak PT Bina Insan Sukses Mandiri harus membayar Fee lahan atau kompensasi kepada masyarakat yang telah

tertunda dan tidak memberikan fee lahan atau ganti rugi kepada pemerintah akan tetapi harus memberikan kepada masyarakat langsung (Satu, 2019).

Pentingnya penelitian ini untuk menganalisis pihak PT. Bina Insan Sukses Mandiri apakah telah menjaga lingkungan yang sudah tertuang di dalam *Analisis Dampak Lingkungan* mengenai analisis baku mutu yang berisikan air, tanah dan udara untuk di jaga kualitasnya guna tidak memperparah kerusakan lingkungan da keadaan masyarakat sosial di kampung Linggang Marimun Kecamatan Mook Manaar Bulan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka akan dilakukan penelitian terkait bagaimana dampak dari operasi PT Bina Insasn Sukses Mandiri (PT BISM) yang bergerak di bidang tambang batu bara yang berdampak terhadap masyarakat yang disekitaran kampung Linggang Marimun, Kecamatan Mook Manaar Bulan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, penelitian ini juga memiliki variabel dan indikator yang akan di jelaskan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Tabel Variabel & Indikator

Variabel	Indikator
Dampak terhadap Sosial Politik	1.Timbul Politik Patronase dan Politik Transaksional
Dampak Terhadap Sosial Kebudayaan	1. Perubahan Pola Kebudayaan 2. Timbulnya konflik Agraria
Dampak Terhadap Lingkungan Fisik	1. Pencemaran Air 2. Pencemaran Udara 3. Pencemaran dan Kerusakan Tanah

--	--

Dari gambaran tabel variabel dan indikator di atas akan dijelaskan pada sub bagian hasil pembahasan.

METODE

Pendekatan penelitian ini kualitatif melihat suatu perilaku dan kebiasaan dari subjek kemudian di diskripsikan menggunakan bahasa dan metode bahasa ilmiah. Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur di PT Bina Insan Sukses Mandiri tepatnya di Kec. Mook Manaar Bulatan Desa Linggang Marimun terkait mendapatkan data yang benar dari responden terkait dampak negatif dari beroperasinya tambang batu bara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini jenis data primer yang didapatkan secara langsung dan jenis data sekunder yang diperoleh dari media maupun website, dengan teknik pengumpulan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Unit analisis data penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup KAB Kutai Barat, Kepala Desa Linggang Marimun, Human Resource Departemen PT BISM, Kepala Adat, Masyarakat di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2. Subjek Penelitian

No	Narasumber	Jumlah
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup KAB Kutai Barat	1
2	Kepala Desa Linggang Marimun	1

3	Human Resource Departemen PT Bina Insan Sukses Mandiri	1
4	Kepala Adat	1
5	Masyarakat	2
Total		6

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sub hasil dan pembahasan tentang kajian dampak dari operasionalisasi PT Bina Insan Sukses Mandiri dalam eksploitasi lahan tambang batu bara di Kampung Linggang Marimun Kecamatan Mook Manar Bulan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dengan sesuai yang sesuai di rumusan masalah yaitu bagaimana dampak dari operasional PT Bina Insan Sukses Mandiri.

Timbulnya Politik Patronase dan Politik Transaksional

Pada penelitian ini harus di pahami terlebih dahulu tentang sejarah dari PT BISM beroperasi sejak tahun 2010 dengan penerbitan izin tahun 2006 akan tetapi berjalannya PT BISM berhenti di tahun 2014, menurut dokumet PT BISM (2017) *Laporan Studi Kegiatan Pembangunan Batu Bara*, menyatakan berhentinya operasi PT BISM pada tahun 2014 adanya guncangan perekonomian yang menghalang PT BISM untuk diberhenti (Mandiri, 2017). Informasi di tahun 2014 oleh media berita Prokaltim.com *PT BISM, Warga Marimun dan Kalaq Resah*, bahwa tutupnya PT BISM tahun 2014 tidak ada hubungannya dengan guncangan perekonomian melainkan ada pihak tertentu yang selalu menghalangi kegiatan PT BISM tersebut (Prokal, 2014). Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan oleh peneliti kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat menyatakan:

“Pemilik sahan pertama PT BISM ini pada awalnya beroperasi adalah bapak H. Udin Mak salah satu petinggi ormas yang ada di Kutai Barat (Wawancara, 2021)”.

Berdasarkan wawancara tersebut kepemilikan saham PT BISM bersama aktor politik yang berada di Kutai Barat dalam rangka mendukung adanya operasi pertambangan batu bara.

Pada awal operasinya PT BISM tersebut kepemilikan saham perusahaan tersebut oleh H. Udin Mak yang memiliki latar belakang organisasi masyarakat yang ada di Kutai Barat. Berdasarkan dokumen dari PT BISM Analisis Dampak Lingkungan Hidup (2006), luasan lahan pada awal beroperasinya PT BISM seluas 5.000 Hektar hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Barat: 545/K.297/2006 dengan menyatakan tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi kepada pihak PT BISM (Mandiri, 2006).

Surat keterangan tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi kepada pihak PT BISM tersebut di keluarkan oleh Bupati Kutai Barat yang saat itu dijabat oleh Ismail Thomas pada tahun 2006 – 2011 dan 2011 – 2016 yang berasal dari partai PDI-Perjuangan tidak hanya menjadi bupati Kutai Barat, Ismail Thomas juga pernah menjabat anggota DPRD Kutai Barat tahun 2000 – 2001 serta pernah menjabat ketua DPC PDI Perjuangan pada tahun 2001 – 2018 berdasarkan hasil wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat:

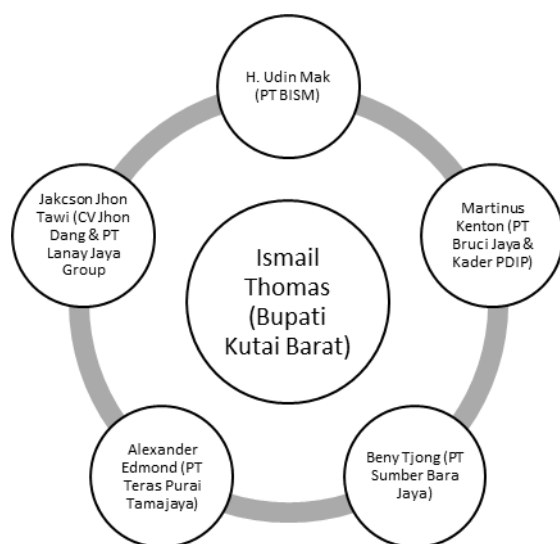
“H. Udin Hak memiliki kedekatan pribadi terhadap aktor – aktor

politik yang berada di Kutai Barat (Wawancara, 2021)”.

di Kabupaten Kutai Barat dan terdapat satu perusahaan yang bergerak di bidang budidaya kelapa sawit

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terindektifikasi bahwa kepemilikan saham PT BISM yaitu H. Udin Hak dan Bupati Kutai Barat pada tahun 2006 yang memiliki kedekatan khusus. Pada tahun 2006 Ismail Thomas menjadi jabatan sebagai Wakil Bupati Kutai Bara periode 2001 – 2006. Berikut adalah gambar tentang pemetaan bantuan dana kampanye yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan tambang batu bara yang berada di Kabupaten Kutai Barat yang melakukan bantuan dana politik terhadap Ismail Thomas guna melancarkan perizinan pertambangan batu bara yang berada di Kabupaten Kutai Barat.

Gambar 1. Peta Politik Tambang Kutai Barat



Sumber: (Almas, 2013)

Terdapat lima perusahaan yang bergerak di bidang tambang batu bara dan berkonsesi di Kabupaten Kutai Barat dan

juga terdapat satu perusahaan yang bergerak di bidang budidaya kelapa sawit yang beroperasi, ke enam perusahaan ini terindekasi melakukan bantuan kepada Ismail Thomas pada saat maju menjadi calon Bupati di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur bantuan di berikan dari segi pembiayaan kampanye guna menunjang kemenangan pada Ismail Thomas tersebut dan juga mendapatkan perizinan perusahaan yang bergerak di sumber daya alam.

Berdasarkan data yang dijelaskan dan digambarkan bahwasannya strategi politik yang dilakukan oleh Ismail Thomas dengan cara menggunakan patronase dengan menggunakan kekuatan – kekuatan aktor politik, organisasi – organisasi daerah dan juga nasional serta pembisnis guna memenangkan pemilu tersebut, strategi yang dilakukan oleh Ismail Thomas sangatlah kompleks keseluruhan pemangku kepentingan atau stakeholders bersatu untuk melancarkan kepentingan yang di bawa oleh setiap aktor politik dan pembisnis hingga aktor organisasi yang ikut bercampur tangan di dalamnya.

Berdasarkan penelitian oleh Sjafrina Almas (2013) Menguras Bumi Merebut Kursi *Indonesia Corruption Watch*, menyatakan pada saat kepemimpinannya Ismail Thomas tersebut banyak perizinan tambang batu bara dan perizinan kebun kelapa sawit yang di obral oleh Ismail Thomas tersebut dan menurut penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch akan yaitu:

Tabel 2. Perizinan Batu Bara Kutai Barat
2007 - 2012

Tahun	Jumlah Izin	Luas (Ha)
2007	15	247,956
2008	132	395,486
2009	138	387,426
2010	122	658,130
2011	223	1.217,624
2012	267	1.445.297

Sumber. (Almas, 2013).

Berdasarkan tabel perizinan tambang batu bara yang di Kutai Barat Provinsi Kalimantan pada saat kepemimpinan Ismail Thomas terdapat fakta tentang obral – obral perizinan tambang batu bara hal tersebut juga di buktikan adanya penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (2013), pada awal kepemimpinan Ismail Thoas khususnya pada tahun 2007 terdapat 15 perizinan yang dikeluarkan dengan total luas sebesar 247,956 Ha, pada tahun 2008 terdapat lonjatan penerbitan izin sebanyak 132 izin pertambangan batu bara yang diterbitkan oleh Ismail Thomas dengan luas lahan 395,486 pada tahun 2009 terdapat izin pertambangan batu bara yang di keluarkan oleh Bupati Kutai 138 dengan luas 387,426, pada tahun 2010 terdapat 122 perizinan yang seluas lahan 658,130 dan pada tahun 2011 terdapat izin 223 dengan luas 1.217,624 hektar (Almas, 2013).

Data tersebut beroperasinya tambang saat kepemimpinan Ismail Thomas Bupati Kutai Barat terpilih pada tahun 2006 melakukan patronase terhadap perizinan tambang batu bara yang berada di Kutai Barat guna untuk mengambil suara pebisnis batu bara untuk menjadi

lambung politik yang dapat bekerja di kedepannya.

Sesuai dengan studi kasus dalam penelitian ini PT BISM telah terindikasi melakukan bantuan pendanaan kampanye terhadap Ismail Thomas yang pada saat itu mencalonkan diri sebagai Bupati Kutai Barat agar memudahkan perizinan dan operasional dari PT BISM. Dengan menggunakan bumi demi mendapatkan kursi di eksekutif yang disimpulkan bahwa pemberian izin tambang batu bara yang sangat meresahkan bahkan sampai untuk menghancurkan sistem ekologi yang berada di Kutai Barat.

Pada tahun 2014 PT BISM berhenti beroperasi sampai dengan tahun 2016 mulai beroperasi kembali kepemilikan saham oleh Subhash Chand Sethi yang di mana kepemilikan saham dari PT BISM tersebut di ambil dari Negara India dengan didukung adanya Penanaman Modal Asing khususnya yang dilakukan oleh Kementrian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat menyatakan:

Setiap adanya kegiatan pertambangan batu bara yang ada di Kutai Barat ini pasti ada aktor politik yang turut ikut berpartisipasi, hanya saja yang harus di ketahui lagi adalah tentang korelasinya dan harus di ketahui adalah pemilik perusahaan PT BISM ini siapa dan juga adanya bantuan dari aktor politik sehingga dapatlah kemudahan dalam mendaptkan izin dan saat ini PT BISM yang sekarang ini pemilik sahamnya orang asing (Wawancara, 2021).

Berdasarkan pertanyaan hasil wawancara oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat sebuah petunjuk jika perizinan PT BISM pemilik sahamnya dipegang oleh Subhash Chad Sehti pebisnis India yang pemberian izinya tersebut tersistematis ada peran elite politik yang berada di pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

Melihat adanya peran dari elite politik yang berada di pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam memberikan izin kepada PT BISM salah satu bentuk nyata dimana pemerintah memberikan karpet merah kepada perusahaan yang sangat merugikan sistem ekologi.

Perubahan Pola Kebudayaan Masyarakat

Perubahan pola kebudayaan hal ini disebabkan oleh adanya sebuah gejala yang dapat merubah tatanan sosial masyarakat dan kebudayaan, penelitian Sumartono (2019) *Dinamika Perubahan Sosial Dalam Teori Konflik*, menjelaskan variasi dari cara hidup yang telah di terima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk atau ideologi, maupun disebabkan oleh difusi atau penemuan – penemuan baru dalam kelompok masyarakat (Sumartono, 2019).

Kasus penelitian tersebut peneliti mengkaji sama seperti kasus penelitian ini yaitu dampak dari operasionalisasi perusahaan PT BISM batu bara dapat merubah sistem masyarakat yang sudah tercipta kebudayaan turun menurun, seperti contoh masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dari alam bertani dan budidaya ikan. Ketika masuknya suatu

perusahaan yang masyarakat melakukan pergeseran kebudayaan, masyarakat akan berdampak karena perubahan pola kehidupan dan berdampak pada kondisi lingkungan.

Penelitian ini mencoba mengkaji tentang pola perubahan kebudayaan khususnya masyarakat Dayak Tunjung yang berada di area PT BISM, faktor pola perubahan kebudayaan masyarakat Dayak Tunjung berada di Kampung Linggang Marimun adalah (1) berubahnya mata pencaharian masyarakat (2) transmigrasi dan imigrasi penduduk. Hasil wawancara bersama kepala Adat Dayak Tunjung yang berada di Kampung Linggang Marimun:

Pada saat PT BISM ini masuk banyak lahannya di jual dengan lahan untuk membantu kesejahteraan masyarakat, dengan anggapan nantinya masyarakat akan diberikan fasilitas umum dan nantinya orang – orang kami dapat pekerjaan di PT BISM tapi nyatanya kebanyakan pekerja dari luar pulau dan bahkan ada beberapa dari luar negeri (Wawancara, 2021).

Hasil tersebut menyatakan permasalahan mengenai perubahan pola kebudayaan yaitu berubahnya mata pencarian dari masyarakat Dayak Tunjung dan adanya transmigrasi dan emigrasi penduduk di luar pulau Kalimantan pada saat beroperasinya PT BISM.

Perubahan Mata Pencarian Masyarakat

Perubahan mata pencarian khususnya masyarakat Dayak Tunjung yang berada di Kampung Linggang Marimun ini disebabkan adanya suatu operasionalisasi yang dilakukan PT BISM

yang bergerak di bidang tambang batu bara dikarenakan lahan – lahan untuk mempertahankan kehidupan mereka sudah di ambil alih pihak perusahaan tersebut.

Bukunya Herman Hidayat (2011) *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Reformasi*, bahwa setiap ada operasi dari suatu industri khususnya pertambangan mineral pasti membuat pergeseran pola sosial masyarakat yang dikarenakan lahan dulunya digunakan sebagai tempat memperjuangkan kehidupan kini telah berubah menjadi ladang pencaharian para kapitalisme sehingga masyarakat lokal selalu di jadikan buruh kasar atas kegagalan pendidikan di sistem negara Indonesia (Hidayat, 2011).

Dokumen data Kabupaten Kutai Barat (2019) *Kecamatan Mook Manar Bulan Dalam Angka 2019*, kepadatan penduduk yang berada di Kampung Linggang Marimun adalah kampung penduduknya paling pada keda sekecamatan Mook Manar Bulan, seperti yang terdata di tabel berikut:

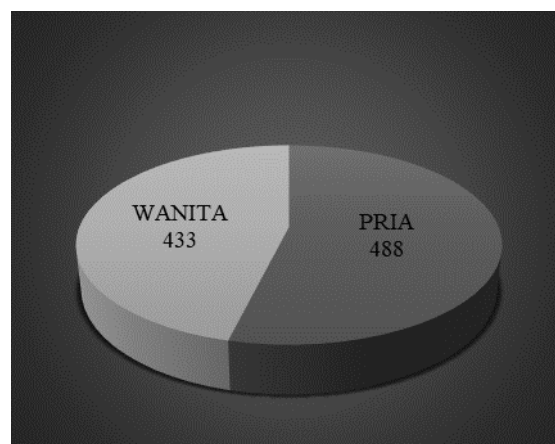
Tabel 3. Kepadatan Penduduk Kecamatan Mook Manar Bulan

Kampung	Jumlah Penduduk
Gadur	319
Sakaq Tada	436
Gemuruh	414
Sakaq Lotoq	606
Karangan	385
Kelumpang	528
Linggang Marimun	921
Muara Batuq	861
Gunung Rampah	695
Muara Jawaq	1.301

Sumber Data: (Badan Pusat Statistik Kutai Barat, 2019).

Berdasarkan data tersebut Kampung Linggang Marimun menempati posisi kedua angka kepadatan penduduk tertinggi, adapun kepadatan penduduk sesuai gender (Badan Statistik Kutai Baat, 2019), sebagai berikut:

Gambar 2. Jumlah Penduduk Menurut Gender



Sumber Data: (Badan Pusat Statistik Kutai Barat, 2019).

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Adat Dayak Tunjung yang berada di kampung Linggang Marimun Kecamatan Mook Manar Bulan (Badan Pusat Statistik Kutai Barat, 2019). Dokumen dari BISM Laporan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020-2024 (2020), menyatakan bahwa sebelum masuknya PT BISM mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai petani dengan tanaman perkebunan karet, buah durian, langsung, cempedak, lei, selain bertani mata pencaharian masyarakat yang berada di Kampung Linggang Marimun ini khususnya masyarakat Dayak Tunjung menjadi nelayan sungai yang dekat dengan sungai, lalu menjadi pedagang pasar (Mandiri, 2020), dari dokumen yang

dijelaskan tersebut akan di paparkan dalam bentuk tabel:

Tabel 4. Jenis Pekerjaan Kampung Linggang Marimun

Jumlah Pekerjaan	Jumlah
Petani	241
Nelayan	124
Wiraswasta	3
Aparatur Sipil Negara	5
Pedagang	14
Karyawan Perusahaan	3
Total	390

Sumber: Dokumen PT BISM 2020

Data lapangan yang disampaikan oleh Kepala Adat Dayak Tunjung yang berada di kampung Linggang Marimun yang menyatakan:

“Mayoritas penduduk kami ini khususnya Dayak Tunjung selalu menggantungkan hidupnya dengan alam khususnya bertani atau berladang dan juga ada menjadi nelayan di pinggir sungai kampung kami ini, walaupun juga ada menjadi karyawan di perusahaan atau di kantor tetapi tidak banyak (Wawancara, 2021).

Keadaan kampung pada saat beroperasinya PT BISM memberikan dampak terhadap pola perubahan kebudayaan khususnya pada perubahan mata pencaharian. Data dari PT BISM *Adendum Andal dan RKL-RPL (2020)*, bahwa terdapat pola perubahan mata pencaharian yang menjadi pegawai di PT BISM, seperti yang jelaskan tabel pekerjaan saat beroperasinya PT BISM:

Tabel 5. Jenis Pekerjaan

Jumlah Pekerjaan	Jumlah
Petani	98
Nelayan	87
Wiraswasta	9

Aparatur Sipil Negara	11
Pedagang	16
Karyawan Perusahaan	241
Total	462

Sumber Data: Dokumen PT BISM 2020

Peningkatan masyarakat yang bekerja jika di karyawan perusahaan total masyarakat yang bekerja pada saat mulai beroperasinya PT BISM yang membuka lapangan pekerjaan selebar – lebarnya untuk masyarakat terkhusus masyarakat Dayak Tunjung yang merupakan penduduk asli Kampung Linggang Marimun.

Pada saat PT BISM melakukan sosialisasi terkait area lahan yang akan digunakan untuk menjadi lahan area konsesi pertambangan batu bara menyataka bahwasannya pihak PT BISM telah mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasa hutan produksi masyarakat (HPM), dalam Peraturan Bupati Kutai Barat No.2 Tahun 2016. Tentang sinkronisasi penggunaan lahan yaitu telah memberikan penggunaan lahan untuk pertmbangan, perkebunan, peternakan dan kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada saat setelah sosialisasi itu berakhir di diperkirakan ada sekitar 87 orang masyarakat dan khususnya masyarakat Dayak tunjung yang melakukan penjualan lahan pertanian mereka kepada pihak PT BISM atau PT Bina Insan Sukses Mandiri hal tersebut di karenakan pada saat pihak PT BISM atau PT Bina Insan Sukses Mandiri ini bersosialisasi merek memberikan suatu pernyataan yang menyatakan bahwasanya menjanjikan ganti rugi lahan kepada masyarakat sekitar yang lahan nya di gunakan oleh pihak PT BISM tersebut lalu memberikan jaminan kerja kepada

masyarakat yang berada di sekitar PT BISM tersebut. Masyarakat yang menjual lahan-lahan pertanian mereka di sebabkan karena luasan lahan konsesi PT Bina Insan Sukses Mandiri ini masuk ke dalam lahan-lahan pertanian masyarakat tersebut sehingga timbulnya pemikiran masyarakat yang telah menjual lahan mereka dengan faktor-faktor yaitu, adanya keinginan untuk memperbaiki pendapatan kehidupan keluarga dan adanya keinginan untuk mendapatkan suatu penghasilan yang lebih besar sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dokumen PT BISM tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Batu Bara (2006), menjelaskan tentang ekonomi pendapatan masyarakat di Kampung Linggang Marimun ini berkisaran antara Rp.655.000 sampai Rp.2.680.000 sebelum beroperasinya PT BISM (Mandiri, 2006). Selanjutnya Dokumen PT BISM (2020) Laporan Rencana Induk dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 – 2024 menjelaskan pendapatan ekonomi rumah tangga masyarakat Kampung Linggang Marimun pada saat beroperasinya PT BISM ini yang berkisaran antara Rp.3.050.000 sampai dengan Rp.5.000.000, dari kedua dijelaskan juga disadari oleh adanya Kondisi Ekonomi rumah tangga penduduk dapat dilihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh, umumnya pendapatan selama satu bulan (Mandiri, 2020).

Transmigrasi dan Imigrasi Penduduk

Kepemilikan saham PT BISM saat ini adalah warga Negara India yang bersana Subhas Chand Sethi, maka dari itu banyak warga negara asing yang

berimigrasi ke Kampung Linggang Marimun, hal tersebut disampaikan oleh kepala dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat:

Tidak hanya warga negara Indonesia saja yang bekerja di PT BISM itu, akan tetapi banyak juga warga negara India yang bekerja di sana namun mereka juga jarang sekali berbaur maupun bergaul dengan warga setempat malahan mereka membuat kelompok mereka saja jadi saya pikir masyarakat lokal khususnya warga Dayak Tunjung tidak terganggu dengan kehadiran mereka ini (Wawancara, 2021).

Masuknya pendatang luar Kalimantan khususnya masyarakat Jawa yang menjadi transmigran yang juga memberikan pemicu dampak perubahan sosial budaya. Masuknya pendatang dari luar Kalimantan membuat perubahan gaya hidup warga lokal yang berada di Kampung Linggang Marimun ini berumah mulai mengikuti zaman modern yang menuju arah pemikiran rasional dan tingkah laku bahkan perubahan bahasa Dayak menjadi bahasa Indonesia yang digunakan di kehidupan sehari – hari, hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Adat Dayak Tunjung di Kampung Linggang Marimun:

“Kedatangan sodara – sodara kami yang meruapakan penduduk dari luar pulau Kalimantan ini merupakan hal yang sangai istimewa sekali buat kami semua, sebab kami bisa belajar dengan pendatang tentang kebudayaan mereka, tentang keadaan pulau mereka dan bisa beradaptasi, dengan mereka memiliki pemikiran yang maju, sifat kami terbuka kepada siapapun dan kami juga mudah menerima

orang – orang luar yang datang ke wilayah kami, bahkan kami bisa berdialog kepada pendatang – pendatang (Wawancara, 2021).

Wawancara tersebut dikuatkan oleh data dari PT BISM (2006) Analisis Dampak Lingkungan yang disajikan dalam bentuk tabel:

Gambar 3. Inklusi dan Eksklusi Masyarakat

No	Pendapat tentang Kemudahan Menerima Penduduk Pendatang	Jumlah	Persentase (%)
1	Masyarakat mudah menerima penduduk pendatang lokal	30	100
2	Masyarakat sulit menerima penduduk pendatang	0	0
JUMLAH		30	100

Sumber : Data Primer, 2008

Sumber: Dokumen PT BISM

Hasil persentase dari 30 masyarakat 100% yang menerima kedatangan pendatang, maka masyarakat Kampung Linggang Marimun memiliki sifat keterbukaan. Berdasarkan data dokumen PT BISM (2006) Analisis Dampak Lingkungan, bahwa masyarakat lokal di Kampung Linggang Marimun memberikan syarat untuk penduduk pendatang yang berasal dari luar yaitu bisa berbaur dan bekerja sama dengan penduduk lokal, memberikan bantuan fisik terhadap penduduk lokal, mengikuti kegiatan yang ada di kampung Linggang Marimun serta menjadi salah satu anggota pelopor organisasi sosial (Mandiri, 2006). Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek yang lebih diutamakan oleh masyarakat lokal yang berada di Kampung Linggang Marimun ini adalah aspek kebersamaan bagi penduduk pendatang.

Konflik Lahan

Berdasarkan kajian primer penelitian ini beberapa masyarakat yang berada di Kampung Linggang Marimun terdapat indikasi suatu konflik lahan yang

terjadi, penggusuran lahan milik masyarakat sebanyak tiga lahan pertanian milik masyarakat lokal bergerak di bidang karet, durian, cempedak yang memiliki seluar 1,4 hektar. Menurut masyarakat yang berada di Kampung Linggang Marimun adalah lahan hutan kawasan adat dan digunakan untuk masyarakat yang tinggal berada di Kampung Linggang Marimun tersebut, salah satu masyarakat yang menyatakan:

Lahan di kampung sinikan biasanya di pakai untuk berladang jadi kita masyarakat ni cuman tau berladang aja di lahan sini tapi tiba – tiba pihak PT BISM itu datang ke kami bilang kalau ladang ini masuk ke area HGU mereka, kami tidak tau ap aitu HGU jadi kami bilang sama siapa kalian minta dan sepegatuan kami memiliki lahan in ikan masyarakat adat bukan hak kalian mengambil alih lahan kami dengan seenaknya (Wawancara, 2020).

Adanya perampasan lahan yang dilakukan oleh pihak PT BISM terhadap masyarakat yang berada di Kampung Linggang Marimun, berdasarkan yang disampaikan oleh Kepala Adat Dayak Tunjung:

Masyarakat ini mana tau undang – undang maka dari itu kami butuh perlindungan hukum tapi apa kenyatan kami yang minta perlindungan malah kami yang dimainkan, masyarakat ini khususnya di kampung sin ikan mana tau hukum kalau hukum rimba dan hukum adat masyarakat disini tau (Wawancara, 2021).

Pada tahun 2014 aparatur pemerintah desa dan para lembaga adat sepakat untuk memberikan informasi tentang perampasan tanah yang juga

disambut baik oleh DPRD Kabupaten Kutai Barat dengan janji akan melakukan pertemuan antara masyarakat dan pihak PT BISM untuk membahas tentang lahan – lahan yang sudah dirampas oleh PT BISM dan tentang kompensasi. Akan tetapi sampai saat ini tentang kompensasi lahan selama ini belum dibayarkan oleh pihak PT BISM, hal ini membenarkan dengan ucapan masyarakat dari Kamung Linggang Marimun:

Ganti rugi lahan ini belum di bayar sama sekali oleh PT BISM ini semenjak mereka mengambil alih lahan kami sampai sekarang padahal kami sudah membawa kasus ini ke DPRD daerah tapi belum ada juga di ganti sama pihak perusahaan itu (Wawancara, 2021).

Maka dari itu pihak PT Bina Insan Sukses Mandiri juga harus membayar fee ganti rugi lahan terhadap pihak masyarakat yang lahannya telah di rampas oleh pihak perusahaan tersebut dan juga wajib membiarkan Kawasan lahan tersebut di gunakan sebagai tempat pertanian masyarakat.

Konflik Ketenaga Kerjaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu masyarakat yang berada di Kampung Linggang Marimun tersebut menyatakan bahwa tahun 2017 terdapat konflik ketenagakerjaan konflik tersebut dipicu ada sekitar 8 masyarakat yang tidak terima kerja di PT BISM , warga lokal yang menyatakan bahwa:

“Pada waktu itu ada konflik karena ada delapan warga asli kampung sini yang tidak diterima kerja di PT BISM itu padahal kedelapan warga itu kan sudah

memberikan lahannya untuk bisa di pake oleh PT BISM untuk menambang tapi kenapa ada warga tersebut tidak terima untuk kerja di situ malahan banyak pekerja asing yang selalu datang untuk kerja di PT BISM (Wawancara, 2021).

Wawancara tersebut serupa yang di informasikan KabarKubar.com (2017) *Tidak Diterima Kerja Di BISM 8 Warga Marimun Mengadu Ke Bupati*, menjelaskan PT BISM terus menerus menerima tenaga kerja asing yang berasal dari India untuk dapat bekerja di perusahaan PT BISM (Hutagalung, 2017). Tanggapan dari hasil wawancara lapangan oleh Kepala Adat Dayak Tunjung terkait masalah kedelapan warga yang tidak dapat pekerjaan di PT BISM:

Permasalahan tenaga kerja lokal yang tidak diterima oleh pihak PT BISM in ikan tidak adil masa, kita tuan rumah tetapi merasa tertindas di rumah sendiri yang dilakukan oleh PT BISM sendiri selalu menerima tenaga kerja asing (Wawancara, 2021).

Wawancara kepada Kepala Adat Dayak Tunjung terkait permasalahan ketenagakerjaan pemerintah desa sudah tiga kali menyurati kepada pihak PT BISM tetapi selalu di abaikan, menurut hasil wawancara dari kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat yang menyatakan:

Memang pernah ada konflik tentang ketenaga kerjaan tersebut dan itu juga pihak masyarkat berdemo di depan kantor saya menuntun untuk mengembalikan hak – hak mereka agar dapat bekerja di PT BISM dan juga meminta kepastian tentang ganti rugi lahan yang belum dibayarkan pihak PT BISM kepada warga di

Kampung Linggang Marimun
 (Wawancara, 2021).

Berdasarkan pembahasan konflik ketenaga kerjaan menemukan ketidakadilan yang dilakukan pihak PT BISM kepada masyarakat Kampung Linggang, pihak PT BISM melanggar janjinya.

Keresahan Masyarakat

Berdasarkan hasil ringkasan wawancara yang dibentuk dalam per – poin masyarakat mendapatkan beberapa keresahan yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari operasionalisasi PT BISM di Kutai Barat:

1. Terjadinya longsoran dari galian tanah yang di akibatkan dari pembukaan lahan oleh PT BISM untuk mengambil hasil batu bara yang berada di dalam kandungan tanah, hal tersebut juga telah terjadi sebanyak empat kali dan terbesar di beberapa titik atau lahan galian batu bara.
2. Terjadinya banjir akibat dari penebangan hutan yang dilakukan oleh PT BISM guna untuk membuka lahan agar dapat melancarkan proses operasionalisasi tambang batu bara tersebut.
3. Terganggu kegiatan pertanian dan perikanan milik masyarakat yang disebabkan oleh penurunan kualitas lingkungan sehingga hasil panen dan tangkapan milik masyarakat cenderung lebih kurang baik.

Hal tersebut dijelaskan oleh dokumen PT BISM (2020) *Adendum Andal dan RKL-RPL PT Bina Insan Sukses Mandiri*, tentang dampak keresahan masyarakat.

Tabel 6. Keresahan Masyarakat

Hal yang di resahkan masyarakat	Jumlah	Persentase
Terjadinya longsor dari tanag galian	4	13,3
Terjadinya banjir	2	6,7
Gangguan kegiatan pertanian dan perikanan	3	10,0

Sumber: Dokumen PT BISM

Tidak hanya keresahan yang berbentuk fisik saja yang diresahkan oleh masyarakat, tetapi aktivitas pertambangan batu bara yang dilakukan PT BISM adalah tentang adanya pola penyakit yang akan di jelaskan dalam bentuk tabel:

Tabel 7. Penyakit Akibat PT BISM

Nama Penyakit	Jumlah	Persentase
ISPA	112	38,4
Caries Gigi	30	10,3
TBC Paru – Paru	30	10,3
Malaria	21	7,2
Radang Usus	17	5,8
Penyakit Kulit	11	3,7
Ruda Paksa	8	2,7
Jumlah	239	100

Sumber: Dukomen PT BISM

Hasil data tersebut tidak hanya bentuk fisik yang diresahkan oleh masyarakat, akan tetapi keresahan juga di timbulkan dengan adanya pola – pola penyakit di akibatkan dari operasionalisasi PT BSM yang bergerak di bidang tambang batu bara pada saat operasi (Mandiri, 2020).

Dampak Lingkungan

Menurut data dokumen PT BISM (2006), *Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Batu Bara*,

dalam dokumen tersebut di bab tiga halaman 13 tentang zona awal lingkungan menyatakan bahwa mengingat pH tanah sangat besar perannya terhadap menentukan status kesuburan tanah di Kawasan yang nantinya akan di jadikan tempat pertambangan batu bara oleh PT BISM, tanah tersebut memiliki tingkat kesuburan yang sangat dalam sehingga zat – zat biologisnya masih sangat tertata (Mandiri, 2006). Maka dari itu masyarakat yang tinggal di kampung Linggang Marimun melakukan penanaman yang bertujuan untuk budidaya, seperti yang dikatakan salah satu masyarakat Kampung Linggang Marimun:

Banyak masyarakat yang sudah meninggalkan budidaya tanaman yang bernilai ekonomis khususnya budidaya tanaman buah durian dan buah lei, hal ini dikarenakan banyak buah durian dan lei pada saat musim panen banyak yang berkualitas rendah dan mudah yang di hasilkan pun cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan pada saat dulu belum ada kegiatan pertambangan di kampung ini, salah satunya faktor krisis tanah kami sudah tidak baik (Wawancara, 2021).

Akan tetapi hal lapangan terdapat beberapa masyarakat berbondong – bonding mulai meninggalkan budidaya tanaman mereka lebih memilih kerja di PT BISM dan ada juga yang masih bertahan membudidaya tanaman.

Kesimpulan

Dampak dari operasionalisasi PT BISM ini sangat lah kompleks mulai dari dampak terhadap sosial – politik yaitu adanya gerakan patronase dan political

tansaksional yang juga turut menghiasi proses dari kemenangan dari Ismail Thomas dan juga proses perizinan PT BISM.

Tidak hanya itu saja dampak dari operasionalisasi PY BISM juga menyebabkan adanya perubahan pola kebudayaan yang berada di masyarakat Kampung Linggang dari perubahan mata pencaharian sampai dengan adanya masyarakat yang datang dari luar pulau Kalimantan dan pekerja dari TKA asal Negara India.

Konflik yang dihasilkan dari PT BISM juga sudah sangat kompleks mulai dari Kesehatan masyarakat yang meresahkan adanya longsor, terjadinya banjir bahkan mengakibatkan banyaknya masyarakat terkena beraneka ragam penyakit, lingkungan hidup yang berdampak seperti pencemaran tanah yang dikarenakan dari operasionalisasi PT BISM.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kutai Barat. (2020). Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2020. Retrieved from <https://kubarkab.bps.go.id/publication/download.html>
- Hidayat, H. (2011). *Politik Lingkungan*. IKAPI DKI Jakarta.
- Hutagalung, S. L. (2017). Tidak Diterima Kerja di BISM 8 Warga Marimun Mengadu Ke Bupati. *KabarKubar.Com*. <http://kabarkubar.com/tidak-diterima-kerja-di-bism-8-warga-marimun-mengadu-ke-bupati/>
- MANDIRI, P. B. I. S. (2020a). *ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL*.

- MANDIRI, P. B. I. S. (2020b). *ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL*.
- Mandiri, P. B. I. S. (2019). *Adendum, Perkiraan dan Evaluasi Dampak Penting*.
- MANDIRI, P. B. I. S. (2006c). *Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara* (pp. III-1).
- PROKAL.CO. (2014). PT BISM, Warga Kampung Linggang Marimun Resah. *PROKALTIM*.
<https://kaltim.prokal.co/read/news/114635-pt-bism-warga-marimun-dan-kalaq-resah>
- Satu, P. (2019). DPRD Kubar Meminta PT BISM Membayar FEE masyarakat Linggang Marimun. *Pena Sati.Com*.
<https://penasatu.com/dprd-kubar-minta-pt-bism-bayar-fee-masyarakat-linggang-marimun/>
- Sjafrina Almas, Widoyoko Danang, A. L. (2013). Menguras Bumi Merebut Kursi. *Indonesia Corruption Watch*, 8-10.
- Sumartono. (2019). Dinamika Perubahan Sosial Dalam Teori Konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis, Volume 5(1)*.